

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Boediono (2005) menyatakan bahwa informasi yang wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan oleh pihak eksternal dalam menilai kinerja perusahaan.

Laporan keuangan sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Setiap laporan keuangan biasanya memiliki fungsi nya masing-masing, sebagai contoh laporan laba rugi digunakan sebagai pengukuran kinerja perusahaan dalam hal laba yang dihasilkan. Menurut Mashayekhi dan Bazaz (2010), laba merupakan sebuah informasi yang sangat dipertimbangkan oleh pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi dan penilaian terhadap kinerja perusahaan, sehingga laba yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mencerminkan laba yang sesungguhnya. Pemegang saham menjadikan laba sebagai ukuran ringkasan kinerja perusahaan, oleh karena itu kualitas laba yang dilaporkan sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan.

Solechan (2007) menyatakan bahwa praktik manajemen laba sangat mempengaruhi keputusan investasi di suatu perusahaan. Manajemen laba merupakan hal yang perlu diperhatikan karena melibatkan potensi pelanggaran, kejahatan, dan

konflik yang dibuat pihak manajemen perusahaan dalam rangka menarik minat investor.

Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan.

Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Sebagai pengelola perusahaan, manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Dalam kondisi yang demikian ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*). Adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (Richardson, 1998 dalam Ujiyantho & Pramuka, 2007).

Menurut Setyawanti, Suhardjanto & Triatmoko (2013) didalam akuntansi konvensional, pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah hanya kepentingan pemegang saham, sedangkan pihak lain sering diabaikan. Di sisi lain perkembangan pasar modal semakin tinggi, pasar modal sendiri memberikan kesempatan pada para penyandang dana (investor) untuk melakukan investasi pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Para calon investor melihat laporan keuangan sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Perkembangan pasar modal akan memicu praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan agar laporan keuangan perusahaan memiliki performa yang baik. Dengan adanya pasar modal maka perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan efek saham lewat prosedur *Initial Public Offering* (IPO) atau efek hutang.

Manajemen laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan munculnya masalah tertentu yang dilaporkan. Adanya kejadian praktik manajemen laba ini telah memunculkan beberapa kasus dalam pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui. Seperti kasus skandal akuntansi yang terjadi pada raksasa elektronik asal Jepang Toshiba pada tahun 2015.

Kasus pembukuan per 31 Maret 2014 terutama terkait pekerjaan konstruksi, perhitungan dan pembukuan Toshiba telat dipalsukan sehingga pendapatan perusahaan seolah meningkat. Secara resmi Toshiba telah mengumumkan kesalahan perhitungan sebesar 54,8 miliar yen. Dikutip dari www.tribun.com, banyak pengamat dan ahli memperkirakan pemalsuan pembukuan itu diperkirakan mencapai 150 miliar yen.

Dilansir dari *Reuters*, Kamis 3 September 2015 mengungkapkan, hasil dari penyelidikan yang dilakukan akuntan independen, Toshiba melebih-lebihkan keuntungan US\$12 miliar dolar selama beberapa tahun. Kemungkinan Toshiba akan memasukkan kerugian bersih sebesar 10 miliar yen atau sekitar Rp 1,17 triliun pada laporan keuangannya tahun 2014-2015. Pada 1 September 2015, Toshiba menunda mengumumkan laporan keuangannya untuk yang kedua kalinya, karena adanya penemuan kesalahan perhitungan akuntansi. Perusahaan tersebut memiliki waktu hingga 7 September, jika tidak beresiko *delisting* dari bursa saham. Saham Toshiba naik 2,5 persen pada perdagangan Kamis 3 September, sementara di pasar lebih luas, naik 1,9 persen. Melihat dari upaya yang dilakukan, ada kemungkinan Toshiba bisa

melewati batas waktu yang ditentukan seperti yang dikutip dari www.bisnis.news.viva.co.id.

Terungkapkan kejanggalan pada laporan keuangan Toshiba yang melebihi lebihkan keuntungan ini menurut *Reuters*, kemungkinan Toshiba akan dijatuhi denda senilai 300-400 miliar yen. Jumlah denda ini belum final, dan Toshiba masih menunggu temuan lain pihak ketiga sebelum membuat keputusan tentang masalah tersebut. Selain skandal akuntansi, ada faktor lain yang membuat Toshiba kewalahan yaitu karena sepak terjang perusahaan pesaing dari Korea Selatan dan China. Maka Toshiba terindikasi menyerah dan ingin menjual unit bisnis PC dan *home appliances*. Tak heran jika akhirnya Toshiba menutup beberapa pabrik televisinya di beberapa negara termasuk Indonesia (inet.detik.com).

Toshiba telah menutup pabrik terbesarnya di Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik tersebut merupakan pabrik terakhir milik Toshiba yang ada di Indonesia. Disinyalir, dalam 10 tahun terakhir Toshiba telah menutup enam perusahaannya di Indonesia. Toshiba resmi tutup, pada April 2016 telah dieksekusi. Akibatnya karyawan Toshiba yang terancam menganggur hampir berjumlah 900 orang (<http://fokus.news.viva.co.id/>).

Berdasarkan kasus diatas masalah manajemen laba ini terjadi adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemilik dengan pengelola usaha, dimana manajemen berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang

tidak simetris atau asimetri informasi. Asimetri antara manajemen dengan pemilik dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba.

Diantara pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan ini terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak atau sering disebut dengan perencanaan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Konflik *agency* yang dapat menimbulkan manipulasi kualitas laba dapat diminimalisir dengan salah satu mekanisme penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor,

pemerintah, karyawan, serta para pemegang internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, tata kelola perusahaan ini merupakan sebuah sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan dari tata kelola perusahaan ini yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang tata kelola perusahaan mengandung 4 prinsip penting, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip transparansi. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

Akuntabilitas dalam prinsip tata kelola perusahaan adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini

diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Prinsip tata kelola perusahaan lainnya mengenai pertanggung jawaban perusahaan. Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Tata kelola perusahaan juga memperhatikan prinsip kewajaran (*fairness*).

Secara sederhana kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) atau keputusan-keputusan yang dapat

merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

Selain tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan yang besar dan tumbuh bisa merefleksikan tingkat profit mendatang, Suharli (2006). Menurut Sujianto (2001) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan jika dilihat dari total aset yang dimiliki, apabila perusahaan memiliki total aset yang besar, maka pihak manajemen akan lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen sebanding dengan kekhawatiran yang dirasakan oleh pemilik atas

asetnya. Jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimiliki manajemen dalam mengendalikan perusahaan sangat berpeluang besar dalam memanipulasi nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, ukuran dewan direktur, dewan direktur independen, ukuran komite audit, komite audit independen, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional sangat berpengaruh terhadap manajemen laba. Dimana semua faktor tersebut berperan penting dalam rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direktur berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
2. Apakah dewan direktur independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
3. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direktur terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan direktur independen terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit independen terhadap manajemen laba.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada manajemen perusahaan, agar perusahaan lebih memperhatikan komponen yang berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga ketika perusahaan melakukan manajemen laba, perusahaan dapat melakukannya dengan baik dan wajar.

Dengan demikian, laporan keuangan yang disediakan adalah laporan keuangan yang dapat dipercaya, baik, serta wajar. Sehingga menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menilai kinerja manajemen dan sebagai pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat atas keuangan perusahaan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian akuntansi mengenai pengaruh ukuran dewan terhadap manajemen laba.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi dan pembahasan penelitian ini yang disusun dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN MASALAH

HIPOTESIS

Bab ini terdiri dari kerangka teoritis dan perumusan hipotesis.

Kerangka teoritis akan membahas dan menerangkan penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain serta beberapa literatur lain yang akan menunjang penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi operasional variable, teknik pengumpulan data dan metode analisis data penelitian. Metode analisis data terdiri dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan, yang terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data, uji normalitas data, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian dan rekomendasi disarankan untuk penelitian selanjutnya.